



ANOM BAGASKORO/RADAR JOGJA

AKTIVITAS: Batching Plant SAK memproduksi aspal dan beton untuk konstruksi. Dalam LKPJ, perumda ini setor nol rupiah.

SAK Setor ke Daerah Rp 0 alias Tak Setor

KULON PROGO - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Selo Adi Karto (SAK) tak mencatatkan setoran ke Pemkab Kulon Progo. Hal ini mengacu pada dokumen laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) bupati 2024. Jika mengacu laporan yang disampaikan ke DPRD, SAK memberikan setoran Rp 0 atau tak memberikan setoran ■ *Baca SAK... Hal 3*

Sambungan dari hal 1

Komisaris Perumda SAK Muhadi membenarkan isi LKPJ terkait setoran Rp 0 dari perumda. Namun ia juga tak membenarkan perumda tak memberikan kontribusi ke daerah. "Itu yang tertulis di LKPJ, tapi keuntungan dari perumda mencapai Rp 1,2 miliar," ucapnya (21/2).

Ia menyampaikan, keuntungan perumda sebenarnya mencapai miliaran rupiah. Namun jumlah itu belum dilaporkan ke pemkab. Lantaran pihaknya masih menunggu rapat umum pemegang saham (RUPS).

RUPS segera digelar setelah kepala daerah definitif menjabat. Pasalnya, bupati merupakan perwakilan dari pemkab yang merupakan pemegang saham terbesar. Sehingga, penentuan RUPS menunggu persetujuan pemegang saham terbesar. "Berdasarkan perda

setelah RUPS, pemkab mendapat setoran 50 persen dari laba bersih," ungkapnya.

Akan tetapi setoran dari laba bersih bisa saja tak diambil pemkab. Setoran dapat dikembalikan lagi ke perusahaan untuk belanja modal. Tujuannya untuk memperkuat bisnis melalui modal yang kuat. Namun, pengembalian setoran harus didasarkan pada RUPS.

Laba bersih Rp 1,2 miliar ini telah diaudit akuntan publik pada 2024 lalu, tepatnya pada tahun tutup buku 31 Desember 2024. Laba itu berasal dari penjualan *ready mix* dan asphalt yang merupakan lini bisnis SAK. "Kondisi perusahaan sehat, kemarin juga sudah menyelesaikan audit irda," ungkapnya.

Muhadi menyampaikan, kondisi SAK memang sempat goyang di tahun 2024. Lantaran SAK masih menanggung beban masa lalu. Saat pan-

demasi Covid-19, banyak proyek yang didapat SAK terpaksa dibatalkan hingga membuat lini usaha merugi.

Di sisi lain, perusahaan juga harus menanggung beban operasional perusahaan, seperti belanja tenaga yang harus tetap dibayar. Selama tiga tahun itu, SAK harus menanggung beban hingga mulai berbenah di tahun 2024.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono membenarkan pihaknya telah melaporkan LKPJ ke DPRD Kulon Progo. Ia tak memungkiri adanya setoran Rp 0 dari Perumda Selo Adi Karto. "Itu belum dilaporkan semua, masih ada yang perlu ditinjau," sebutnya.

Triyono menyampaikan, kondisi SAK sudah mulai membaik. Sebelumnya SAK memang sempat diperiksa Inspektorat Daerah setelah pembukaan keuangan dinilai tak sinkron di tahun 2024. (gas/laz/fj)